

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN JUMLAH KERAMBA
JARING APUNG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NO 5 TAHUN 2014 PADA TAHUN 2017-2023**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh:

**Ahmad Arif Martin
No. BP 2010832022**



PEMBIMBING :

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Andri Rusta, S.IP., M.PP**

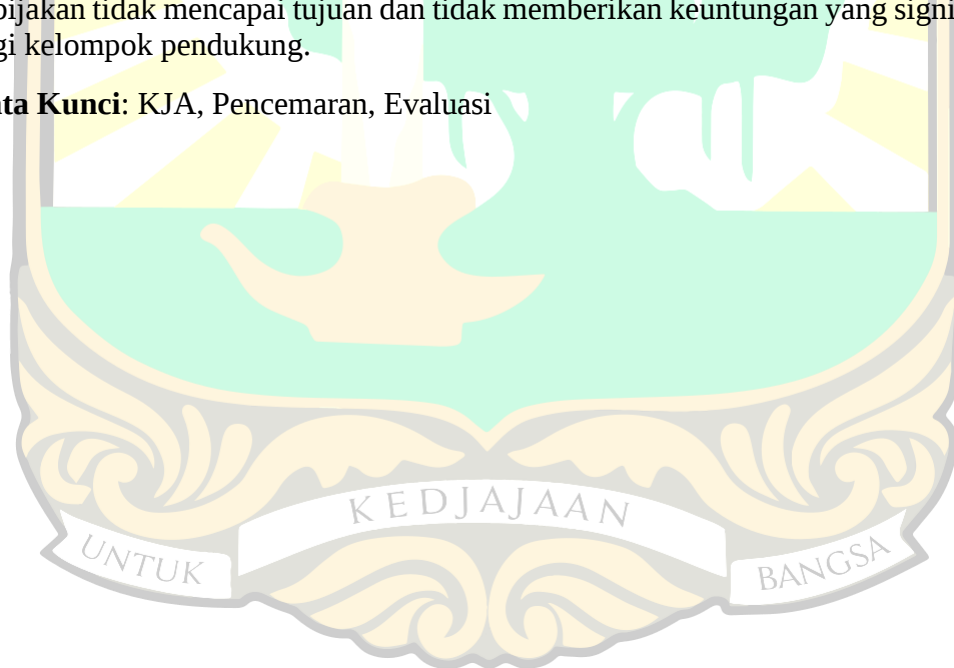
**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

ABSTRAK

Penggunaan KJA (Keramba Jaring Apung) sebagai aktivitas ekonomi menurut LIPI menjadi penyebab utama masalah pencemaran Danau Maninjau, hal ini diakibatkan penggunaan KJA yang tidak terkontrol dan melebihi kapasitas daya tampung danau, fenomena tersebut menjadi latar belakang lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau yang didalamnya berisi regulasi pengendalian jumlah KJA yang tertuang pada pasal 7 yang ingin mengurangi KJA menjadi 6000 petak dalam waktu 10 tahun. Dalam penerapannya ditemukan kendala dimana jumlah KJA justru mengalami peningkatan hingga 23,359 petak KJA pada tahun 2022. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi untuk melihat peta permasalahan sehingga perda tidak mencapai tujuan, evaluasi dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan Allan McConnell yang membagi kebijakan menjadi tiga dimensi yaitu proses, program dan politik dalam melakukan penilaian keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Hasil evaluasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam no 5 Tahun 2014 yang dikhususkan pada pasal 7 yaitu pengendalian jumlah KJA didapatkan hasil kegagalan kebijakan dikarenakan kebijakan tidak mencapai tujuan dan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi kelompok pendukung.

Kata Kunci: KJA, Pencemaran, Evaluasi



ABSTRACT

The use of Floating Net Cages (FNC) as an economic activity, according to LIPI, is the main cause of pollution in Lake Maninjau. This is due to the uncontrolled use of KJA, which exceeds the lake's capacity. This phenomenon became the background for the establishment of the Regional Regulation of Agam Regency No. 5 of 2014 on the Management of Lake Area Sustainability, which includes regulations on controlling the number of KJA in Article 7, aiming to reduce the number of KJAs to 6,000 units over 10 years. However, in practice, a challenge was found where the number of KJAs increased to 23,359 units by 2022. This prompted researchers to evaluate the situation in order to identify the issues preventing the regulation from achieving its goals. The evaluation was carried out using Allan McConnell's policy evaluation model, which divides policy into three dimensions: process, program, and politics, to assess the success or failure of the policy. The research used a qualitative approach with a case study design, and data was collected through interviews and documentation. The results of the evaluation of Agam Regency's Regional Regulation No. 5 of 2014, specifically regarding Article 7 on controlling the number of KJAs, showed a policy failure as the policy did not achieve its objectives and did not provide significant benefits to the supporting groups.

Keywords: FNC, Pollution, Evaluation

